BAB V
SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil analisa data, adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan terhadap Pengelolaan BMN

   Komitmen pimpinan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi komitmen pimpinan maka semakin baik pengelolaan BMN di unit kerja.
2. Kompetensi SDM terhadap Pengelolaan BMN

   Kompetensi SDM juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMN. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM semakin baik pengelolaan BMN di unit kerja.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan BMN

   Pemanfaatan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan BMN. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum optimal mendukung efektivitas pengelolaan BMN di unit kerja.
4. Komitmen Pimpinan terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Komitmen pimpinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan belum menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan teknologi informasi di unit kerja.
5. Komitmen Pimpinan terhadap Kompetensi SDM

   Komitmen pimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kompetensi SDM. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi komitmen pimpinan semakin baik kompetensi SDM di unit kerja.
6. Kompetensi SDM terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi kompetensi SDM semakin baik pemanfaatan teknologi informasi di unit kerja.
7. Komitmen Pimpinan yang Dimediasi oleh Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan BMN

   Teknologi informasi tidak berperan sebagai mediator antara komitmen pimpinan dan pengelolaan BMN. Ini berarti bahwa TI tidak berperan secara efektif sebagai jembatan atau penghubung dalam meningkatkan pengelolaan BMN yang

dipengaruhi oleh komitmen pimpinan. Hal ini menunjukan bahwa komitmen pimpinan dapat memiliki efek langsung yang lebih kuat pada kinerja tanpa perlu melalui TI. Artinya, kualitas komitmen pemimpin itu sendiri sudah cukup untuk memberikan dampak tanpa harus mengandalkan teknologi.

8. Kompetensi SDM yang Dimediasi oleh Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan BMN

   Meskipun teknologi informasi dapat mendukung pengelolaan BMN, penelitian menemukan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut tidak berperan sebagai mediator antara kompetensi SDM dan pengelolaan BMN. Artinya, teknologi informasi tidak secara langsung memengaruhi bagaimana kompetensi SDM meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN. Hal ini menunjukan bahwa walaupun TI memberikan dukungan, efektivitas pengelolaan BMN sangat bergantung pada kompetensi SDM itu sendiri.

5.2 Implikasi

Berdasarkan dari hasil análisis data serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini untuk memaparkan temuan-temuan yang diperoleh, maka penulis memberikan beberapa implikasi sebagai berikut

5.2.1 Implikasi Teoritis

1. Penelitian ini memperkuat teori manajemen publik dengan mengintegrasikan variabel kepemimpinan, kompetensi SDM, dan teknologi informasi dalam konteks pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel-variabel ini berkontribusi terhadap pengelolaan aset negara, mendukung konsep-konsep akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam manajemen publik.
2. Penelitian ini mendukung teori RBV yang menekankan pada pengelolaan sumber daya organisasi untuk keunggulan kompetitif, dalam konteks institusi pemerintah. Dengan menunjukkan bahwa sumber daya internal, seperti SDM yang kompeten dan dukungan teknologi informasi, merupakan aset strategis yang memengaruhi pengelolaan BMN.
3. Hasil penelitian yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai mediator memberikan kontribusi pada pengembangan model TAM dengan mengaplikasikannya dalam konteks pengelolaan aset negara, menyoroti peran kritis penerimaan teknologi oleh pengguna dalam mendukung efisiensi organisasi.

4. Implikasi teoritis ini dapat memperkaya literatur tentang manajemen aset negara, pengelolaan teknologi, dan peran sumber daya manusia dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks lain atau skala yang lebih luas.

5.2.2 Implikasi Praktis

1. Pengelolaan BMN

   Variabel pengelolaan BMN dengan rata-rata butir terbesar adalah indikator penatausaahan BMN yang menggambarkan bahwa aspek pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset negara telah dilakukan dengan baik. Hal tersebut penting untuk di pertahankan.
2. Komitmen Pimpinan

   Variabel komitmen pimpinan dengan rata-rata butir terbesar adalah indikator komitmen afektif yang menggambarkan bahwa pimpinan memiliki keterikatan emosional, rasa memiliki, dan loyalitas yang kuat terhadap organisasi. Hal tersebut penting untuk di pertahankan.
3. Kompetensi SDM

   Variabel kompetensi SDM dengan rata-rata butir terbesar adalah indikator sikap yang menggambarkan bahwa pegawai memiliki komitmen, etos kerja, etika dan kesadaran tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN. Hal tersebut penting untuk di pertahankan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan rata-rata butir terbesar adalah indikator pemanfaatan software yang menggambarkan bahwa penggunaan perangkat lunak dalam pengelolaan BMN telah dioptimalkan dan berperan penting dalam mendukung efektivitas serta efisiensi kerja. Hal tersebut penting untuk di pertahankan.

5.3 Saran

Saran yang diajukan sebagai tindak lanjut temuan penelitian adalah sebagai berikut

1. Pengelolaan BMN

   Pada variabel pengelolaan BMN, aspek yang perlu diperbaiki yaitu pada indikator Perencanaan kebutuhan dan pengadaan, dimana proses tersebut masih menghadapi kendala atau belum optimal. Perencanaan dan pengadaan BMN berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.06/2021 telah mengalami perubahan signifikan dari regulasi sebelumnya, PMK 150/PMK.06/2014, dengan cakupan yang lebih luas. Maka disarankan untuk Menyusun pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP) internal yang selaras dengan regulasi baru untuk memastikan kepatuhan dalam perencanaan kebutuhan BMN, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara bagian/ unit kerja agar kebutuhan BMN dapat diidentifikasi secara lebih efektif dan tidak terjadi *over-procurement* atau *underutilization* serta evaluasi berkala terhadap efektivitas perencanaan kebutuhan BMN untuk mengidentifikasi kendala yang muncul dalam implementasi regulasi baru.

2. Komimen Pimpinan

   Pada variabel komitmen pimpinan, aspek yang perlu diperbaiki yaitu pada indikator komitmen kontinyu/keberlanjutan, dimana skor data variabel terendah pada indikator ini menunjukkan bahwa pimpinan masih menghadapi tantangan dalam menjamin keberlanjutan kebijakan serta dukungan terhadap pengelolaan BMN. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan upaya untuk meningkatkan komitmen pimpinan dalam perumusan kebijakan pengelolaan bmn dengan kebijakan strategis pengelolaan BMN yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam jangka panjang dengan memastikan kebijakan yang diterapkan mengoptimalkan manfaat ekonomi dan efisiensi bagi negara. Pemimpin juga perlu mendorong budaya kerja yang lebih positif dengan memberikan dukungan moral dan motivasi terhadap kinerja pegawai.

3. Kompetensi SDM

   Pada variabel Kompetensi SDM, aspek yang perlu diperbaiki yaitu pada indikator ketrampilan tentang pelatihan yang diikuti untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola BMN. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi dan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan keterampilan pegawai dalam pengelolaan BMN masih rendah. Hal ini menunjukan adanya kebutuhan meningkatkan frekuensi dan ketersediaan pelatihan BMN dengan menyediakan modul pelatihan yang lebih spesifik dan menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan pegawai selain itu perlu memastikan kesetaraan dalam akses pendidikan dan pelatihan bmn bagi setiap pegawai dengan menyusun program pelatihan berkelanjutan untuk seluruh karyawan yang terlibat dalam pengelolaan BMN agar memiliki pemahaman yang sama terkait regulasi dan praktik terbaik, menyediakan akses yang merata dan

tidak diskriminatif terhadap pendidikan dan pelatihan terkait BMN, termasuk pelatihan berbasis kompetensi dan memanfaatkan platform *e-learning* atau pelatihan daring agar lebih banyak pegawai dapat mengakses pelatihan dimanapun dan kapanpun serta membangun ekosistem pendukung organisasi pembelajar, meningkatkan budaya berbagi pengetahuan dan evaluasi mandiri (misalnya melalui *after action review* dan evaluasi mandiri).

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi, aspek yang perlu diperbaiki yaitu pada indikator pemanfaatan *brainware,* di mana skor terendah pada variable ini menunjukan bahwa pegawai masih menghadapi kendala dalam menggunakan dan mengoptimalkan aplikasi SIMAN serta menghadapi tantangan dalam akses jaringan yang tidak stabil. Hal ini menunjukan perlunya lakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur dan tata kelola teknologi informasi, memastikan bahwa perangkat lunak, hardware, dan alur kerja TI benar-benar mendukung proses pencatatan dan pemantauan BMN, meningkatkan pemahaman pegawai terhadap fungsi dan cara kerja SIMAN serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengatasi permasalahan pada aplikasi SIMAN dengan pelatihan teknis berkala yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fitur dan cara kerja aplikasi SIMAN serta menjalin kerja sama dengan tim pengembang SIMAN untuk meningkatkan *user experience* dan kemudahan penggunaan aplikasi.

5.4 Keterbatasan Penelitian

1. Responden yang Terbatas pada Lingkungan Badan POM

   Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan responden yang hanya berasal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada instansi pemerintah lainnya di Indonesia.

2. Desain Penelitian yang *Cross-Sectional*

   Penelitian menggunakan data yang dikumpulkan dalam satu periode waktu tertentu. Pendekatan ini membatasi pemahaman tentang perubahan dinamika variabel yang diteliti, seperti pengaruh jangka panjang dari komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan BMN.

3. Keterbatasan Variabel Penelitian

   Penelitian ini hanya berfokus pada tiga faktor utama, yaitu komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi, sebagai faktor yang memengaruhi pengelolaan BMN. Meskipun faktor-faktor ini signifikan, terdapat kemungkinan bahwa variabel lain, seperti regulasi, budaya organisasi, dan sistem pengendalian internal, juga memiliki pengaruh yang penting.

5.5 Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Perluasan Cakupan Responden

   Penelitian mendatang disarankan untuk melibatkan responden dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia, baik tingkat pusat maupun daerah, guna memperoleh data yang lebih representatif terkait pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Serta dapat melakukan perbandingan antar instansi yang memiliki karakteristik berbeda, seperti lembaga kementerian, non-kementerian, atau pemerintah daerah, untuk mengidentifikasi pola pengelolaan BMN di setiap jenis organisasi.

2. Desain Penelitian Longitudinal

   Penelitian mendatang disarankan untuk menggunakan desain longitudinal yang memungkinkan pengamatan terhadap perubahan dan perkembangan pengelolaan BMN dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan desain longitudinal, peneliti dapat mengevaluasi dampak jangka panjang kebijakan baru atau reformasi dalam pengelolaan BMN terhadap variabel penelitian

3. Penambahan Variabel Penelitian

   Penelitian mendatang dapat memasukkan variabel lainnya misalnya kepatuhan terhadap regulasi, budaya organisasi, sistem pengendalian internal, adopsi teknologi terkini atau variabel lain sebagai faktor penting yang memengaruhi pengelolaan BMN.

4. Kombinasi Metode Penelitian

   Penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* untuk menggali lebih dalam pengalaman subjektif responden yang tidak dapat diukur dengan kuantitatif, seperti wawancara mendalam mengenai kendala dalam pengelolaan BMN. Peneliti juga dapat mengevaluasi pola pengelolaan BMN berdasarkan data transaksi dan laporan yang tersedia.

5. Berfokus pada salah satu kegiatan pengelolaan BMN

   Pengelolaan BMN mencakup berbagai aktivitas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kegiatan ini meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan, pinjam pakai, dll.), Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan (hibah, tukar menukar, dll.), Pemusnahan dan penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Karena cakupan yang luas, penelitian yang mencakup seluruh siklus ini bisa menjadi terlalu umum dan sulit memberikan rekomendasi spesifik yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, fokus pada satu kegiatan akan menghasilkan temuan yang lebih mendalam dan *actionable.*